



---

## Distribusi Yang Tak Merata: Refleksi Teoretis Dan Empiris Dari Studi Literatur Ekonomi

**Sahla Adnin Karimah**

*sahlaadninkarimah@gmail.com*

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Nova Gita Lestari**

*sнова6377@gmail.com*

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Muhammad Farhan Al-muzhaffar**

*mfarhan.almuzhaffar.27@gmail.com*

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, 35131

Korespondensi penuli : *sahlaadninkarimah@gmail*

**Abstract** *This study aims to explore the phenomenon of unequal distribution of income and goods through a literature review approach. Using a qualitative method, the research analyzes a variety of scholarly sources including journals, books, and international institutional reports to understand the root causes and consequences of inequality in both global and national economic contexts. The findings reveal that unequal distribution is not solely the result of imperfect market mechanisms, but also stems from structural economic imbalances, global corporate dominance, unequal access to education, digital divides, and non-inclusive fiscal policies. Two major theoretical frameworks John Rawls's theory of distributive justice and the structural inequality theory from the Neo-Marxian approach offer comprehensive insights into the need for systemic reform. This study emphasizes that inequality is not merely an economic issue, but also a moral and social challenge that must be addressed collectively by states, civil society, and international institutions.*

**Keywords:** *income inequality, distributive justice, literature review, economic policy, structural theory*

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena ketimpangan distribusi pendapatan dan barang melalui pendekatan studi literatur. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan laporan lembaga internasional untuk memahami akar penyebab serta dampak ketimpangan dalam konteks ekonomi global dan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa distribusi yang tidak merata tidak hanya disebabkan oleh mekanisme pasar yang tidak sempurna, tetapi juga oleh struktur ekonomi yang timpang, dominasi korporasi global, ketimpangan akses pendidikan, kesenjangan digital, serta kebijakan fiskal yang tidak inklusif. Dua kerangka teori utama yang digunakan teori keadilan distributif dari John Rawls dan teori ketimpangan struktural dari pendekatan Neo-Marxian—memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlunya reformasi sistem distribusi. Penelitian ini menekankan bahwa ketimpangan bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga isu moral dan sosial yang harus diatasi secara kolektif oleh negara, masyarakat, dan lembaga internasional.

**Kata kunci:** ketimpangan distribusi, keadilan distributif, studi literatur, kebijakan ekonomi, teori struktural

### PENDAHULUAN

Distribusi pendapatan dan barang merupakan salah satu isu sentral dalam kajian ekonomi yang tidak hanya menyangkut persoalan efisiensi, tetapi juga keadilan sosial.

Dalam berbagai sistem ekonomi, distribusi yang merata menjadi tujuan ideal, meskipun realitasnya sangat jauh dari harapan tersebut. Ketimpangan distribusi, baik dalam bentuk penguasaan atas sumber daya ekonomi maupun akses terhadap kebutuhan dasar, masih menjadi tantangan besar di berbagai negara, baik berkembang maupun maju. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga berimplikasi terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan pembangunan<sup>1</sup>.

Secara historis, teori-teori ekonomi telah menawarkan berbagai perspektif dalam memahami distribusi. Aliran klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo menekankan pada peran pasar dalam mengatur distribusi, sementara aliran Marxian mengkritik sistem kapitalis yang secara inheren melahirkan ketimpangan. Di sisi lain, teori keadilan distributif dari John Rawls dan pendekatan kapabilitas dari Amartya Sen lebih menekankan pada keadilan sosial dan kesempatan yang setara. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan kompleksitas dalam memahami dan mengatasi ketimpangan distribusi<sup>2</sup>.

Secara empiris, data global menunjukkan adanya tren peningkatan ketimpangan di banyak negara, terutama sejak era liberalisasi ekonomi global. Laporan dari lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, OECD, dan Oxfam mengungkapkan bahwa sebagian besar kekayaan dunia dikuasai oleh segelintir orang, sementara sebagian besar populasi dunia masih hidup dalam kondisi minim. Di beberapa negara berkembang, ketimpangan pendapatan bahkan terus melebar meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menjamin pemerataan distribusi<sup>3</sup>.

Literatur ekonomi kontemporer juga menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi tidak hanya disebabkan oleh faktor pasar, tetapi juga oleh kebijakan publik, struktur sosial, dan kelembagaan. Kebijakan perpajakan, sistem jaminan sosial, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta regulasi pasar tenaga kerja memainkan peran penting dalam membentuk struktur distribusi. Oleh karena itu, pendekatan multidimensional diperlukan untuk memahami dan mengatasi persoalan ketimpangan ini<sup>4</sup>.

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan distribusi menjadi salah satu isu yang menonjol dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, namun Gini ratio sebagai indikator ketimpangan menunjukkan angka yang masih tinggi. Hal ini menandakan bahwa hasil dari pembangunan ekonomi belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>1</sup> HS. Tisnanta Agus Triono, "Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah," *Jurnal Keindonesiaan* 02, no. 01 (2022): 12–36.

<sup>2</sup> Haidar Akhmad and Al Barabasi, "Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Periode 2017-2023 ( Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia )," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 1 (2025): 221–34.

<sup>3</sup> Adinda Maulida Amalia, "Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia," *Jambura Economic Education Journal* 6, no. 2 (2024): 616–28.

<sup>4</sup> Dhea Anjelita et al., "Analisis Distribusi Pendapatan Di Indonesia Dengan Pendekatan Path Analysis" 4, no. 1 (2024): 1–6.

Ketimpangan antarwilayah, antara desa dan kota, serta antara kelompok sosial juga menjadi sorotan penting dalam kebijakan ekonomi nasional<sup>5</sup>.

Kajian literatur ekonomi yang komprehensif menjadi penting dalam rangka memahami dinamika ketimpangan ini, baik dari sisi teoretis maupun empiris. Melalui studi literatur, kita dapat menelusuri berbagai pendekatan yang telah dikembangkan untuk menjelaskan distribusi yang tak merata, sekaligus menilai efektivitas kebijakan yang pernah diterapkan di berbagai konteks. Kajian ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi celah-celah dalam teori dan praktik yang mungkin belum terakomodasi dalam diskursus ekonomi arus utama<sup>6</sup>.

Refleksi atas literatur ekonomi juga menunjukkan bahwa ketimpangan bukanlah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Berbagai negara telah berhasil menurunkan tingkat ketimpangan melalui reformasi kebijakan yang berfokus pada redistribusi pendapatan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta penguatan institusi demokratis. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor keberhasilan tersebut melalui kajian literatur menjadi kunci dalam merumuskan strategi kebijakan yang kontekstual dan aplikatif<sup>7</sup>.

Dengan menelaah literatur yang ada, kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memetakan kondisi ketimpangan, tetapi juga untuk menggali ide-ide alternatif dalam membentuk distribusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam era di mana kesenjangan sosial dapat menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi, penting untuk mengedepankan pendekatan berbasis bukti dalam merancang intervensi kebijakan. Studi literatur berperan sebagai jembatan antara teori dan praktik, sekaligus sebagai refleksi kritis terhadap paradigma ekonomi yang ada<sup>8</sup>.

Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana ilmiah mengenai distribusi ekonomi serta menjadi bahan pertimbangan dalam formulasi kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial. Ketimpangan tidak semata-mata merupakan masalah ekonomi, melainkan juga persoalan moral, politik, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, memahami distribusi yang tak merata melalui lensa teori dan bukti empiris menjadi langkah awal yang penting dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

---

<sup>5</sup> Nicholas Chang, "Determinan Makroekonomi Dan Pajak Daerah Terhadap Ketimpangan Ekonomi," *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia* 6, no. 2 (2025): 233–60.

<sup>6</sup> Ariadna Aqila Faranisa et al., "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi DIY Tahun 2012-2023 Dengan Pendekatan Model Mixed Effect" 21, no. 1 (2025): 1–11.

<sup>7</sup> Moh Alif Febriyan et al., "The Effect Of Economic Growth , Education And Unemployment On Distribution Inequality In Central Java 2020-2024 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Di Jawa Tengah Tahun 2020-2024" 6, no. 3 (2025): 1959–68.

<sup>8</sup> Azharsyah Ibrahim, "Buku Pengantar Ekonomi I," in *Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*, 2021, 269.

## **KAJIAN TEORI**

### **Teori Keadilan Distributif (John Rawls)**

Teori keadilan distributif yang dikembangkan oleh John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971) merupakan salah satu pilar utama dalam filsafat politik modern dan ekonomi moral. Rawls memperkenalkan konsep “keadilan sebagai fairness” yang didasarkan pada kontrak sosial dan posisi asal (*original position*), yaitu suatu kondisi imajiner di mana individu menyusun prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi sosial mereka dalam masyarakat (*veil of ignorance*). Dalam kondisi tersebut, Rawls menyimpulkan bahwa dua prinsip keadilan akan dipilih secara rasional: prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan<sup>9</sup>.

Prinsip kebebasan yang setara menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama, seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak atas perlindungan hukum. Sementara itu, prinsip perbedaan menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi dapat diterima hanya jika hal itu memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dengan kata lain, keadilan tidak berarti hasil yang sama untuk semua, melainkan ketimpangan hanya dapat dibenarkan bila memperbaiki posisi mereka yang berada di dasar piramida sosial. Prinsip ini memberikan justifikasi moral untuk intervensi negara melalui kebijakan redistributif<sup>10</sup>.

Dalam konteks distribusi pendapatan dan barang, teori Rawls menantang gagasan bahwa pasar bebas akan menghasilkan hasil yang adil secara otomatis. Sebaliknya, ia mendorong terbentuknya sistem yang secara aktif menjamin keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat paling rentan. Kebijakan seperti perpajakan progresif, subsidi pendidikan, layanan kesehatan universal, dan jaminan sosial adalah wujud konkret dari penerapan prinsip perbedaan Rawls. Dengan demikian, teori ini menyediakan kerangka normatif yang kuat untuk menilai dan merancang sistem distribusi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara moral.

### **Teori Ketimpangan Struktural (Dependency Theory dan Perspektif Neo-Marxian)**

Teori ketimpangan struktural muncul dari pengaruh pemikiran Dependency Theory dan aliran Neo-Marxian, yang melihat bahwa ketimpangan bukan semata-mata akibat mekanisme pasar yang tidak efisien atau keterbelakangan internal suatu negara, melainkan akibat dari struktur global yang tidak seimbang. Dalam kerangka ini, dunia terbagi menjadi dua entitas utama: negara-negara pusat (*core*) yang maju secara ekonomi dan teknologi, dan negara-negara periferi (*periphery*) yang bergantung secara struktural kepada pusat. Hubungan ini bersifat eksploitatif, di mana negara pusat mengambil

---

<sup>9</sup> Budi Raharjo, “Buku Ekonomi Mikro,” in *Yayasan Prima Agus Teknik*, 2020, 391.

<sup>10</sup> Taosige Wau, “Buku Ekonomi Internasional Suatu Kajian Teori Dan Empiris,” in *Magister Ekonomi Syariah (MES) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021*, 2021, 231.

keuntungan dari sumber daya dan tenaga kerja murah negara periferi, menciptakan pola ketimpangan yang terus direproduksi<sup>11</sup>.

Distribusi yang tidak merata, baik antarnegara maupun dalam negara, dalam perspektif ini merupakan hasil langsung dari sistem kapitalisme global yang berorientasi pada akumulasi kapital. Aktor-aktor besar seperti perusahaan multinasional, lembaga keuangan internasional, dan elit nasional yang terhubung dengan kepentingan global memainkan peran dominan dalam menentukan arus modal, teknologi, dan kebijakan ekonomi. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi dalam bentuk pendapatan, tetapi juga dalam hal akses terhadap infrastruktur, pendidikan, teknologi, dan layanan dasar. Proses ini memperkuat posisi dominan segelintir kelompok, sementara sebagian besar populasi tetap terpinggirkan.

Sebagai respons terhadap ketimpangan struktural tersebut, teori ini mendorong perlunya reformasi ekonomi yang bersifat mendasar dan menyentuh akar permasalahan. Pendekatan yang ditawarkan mencakup penguatan kedaulatan ekonomi nasional, pembatasan terhadap dominasi modal asing, serta pembangunan ekonomi yang berbasis pada kebutuhan dan potensi rakyat<sup>12</sup>. Dengan demikian, teori ketimpangan struktural memberikan kerangka kritis untuk memahami bagaimana ketidakadilan distribusi tidak hanya bersumber dari dinamika internal suatu negara, tetapi juga dari posisi subordinatnya dalam sistem ekonomi global. Pemahaman ini penting untuk merancang strategi distribusi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) sebagai landasan analisis. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menganalisis berbagai teori serta temuan empiris terkait ketimpangan distribusi pendapatan dan barang dari sudut pandang para ahli. Studi literatur memungkinkan peneliti menggali, membandingkan, dan mensintesis berbagai referensi ilmiah guna membangun pemahaman yang mendalam tentang distribusi yang tidak merata, baik dalam lingkup nasional maupun global. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mengungkap celah dan kesenjangan dalam kajian sebelumnya yang bisa dijadikan dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

Sampel dalam penelitian ini berupa dokumen dan sumber ilmiah yang relevan, seperti artikel jurnal internasional dan nasional terakreditasi, buku akademik, laporan lembaga internasional (World Bank, UNDP, Oxfam), serta skripsi dan tesis yang relevan, yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020–2025). Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria: (1) membahas isu distribusi pendapatan

---

<sup>11</sup> Loso Judijanto, “Ketidakmerataan Kekayaan: Kajian Literatur Tentang Implikasi Sosial Dan Ekonomi,” *Journal of Community Dedication* 5, no. 1 (2025): 61–69.

<sup>12</sup> Rendi Kurniawan and Syamsul Huda, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali,” *Jdep* 3, no. 2 (2020): 91–99.

atau distribusi barang; (2) mengandung kajian teoretis atau temuan empiris yang signifikan; dan (3) tersedia dalam bentuk teks lengkap. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola distribusi, faktor penyebab ketimpangan, serta respons kebijakan yang disarankan dalam berbagai studi tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari studi literatur ini menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dan barang masih menjadi isu global yang kompleks dan berkelanjutan. Berdasarkan berbagai sumber literatur yang dianalisis, ditemukan bahwa ketimpangan terjadi baik dalam skala antarnegara maupun dalam suatu negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Ketimpangan ini ditandai oleh konsentrasi kekayaan di tangan segelintir kelompok elit ekonomi, rendahnya akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta terbatasnya partisipasi kelompok marginal dalam proses ekonomi. Temuan ini konsisten dengan laporan lembaga seperti Oxfam (2023) dan World Bank (2022), yang menyebutkan bahwa 10% populasi terkaya menguasai lebih dari 50% kekayaan dunia<sup>13</sup>.

Secara teoritis, teori keadilan distributif John Rawls dan teori ketimpangan struktural memberikan penjelasan yang saling melengkapi. Teori Rawls menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial melalui kebijakan redistributif untuk melindungi kelompok paling miskin. Ini tercermin dalam literatur yang menekankan efektivitas program-program seperti subsidi, jaminan sosial, dan perpajakan progresif dalam menurunkan ketimpangan. Di sisi lain, teori ketimpangan struktural dari pendekatan Neo-Marxian dan Dependency Theory menjelaskan bahwa distribusi yang timpang tidak hanya bersumber dari kebijakan dalam negeri, tetapi juga dari relasi global yang eksploitatif. Ketimpangan ini diperparah oleh peran dominan perusahaan multinasional dan lembaga keuangan internasional dalam menentukan arah ekonomi negara-negara berkembang<sup>14</sup>.

Literatur juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan hasil pembangunan. Negara-negara seperti Indonesia dan India, meskipun mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil, tetap menghadapi tantangan besar dalam hal kesenjangan pendapatan dan distribusi barang. Beberapa studi menyoroti bahwa pertumbuhan yang bersifat "pro-kapital" lebih banyak menguntungkan pemilik modal daripada pekerja, sehingga memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin.

---

<sup>13</sup> Siti Marti'ah, "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa 2009-2021," *Juremi* 4, no. 6 (2025): 1275–82.

<sup>14</sup> Juni Mashita, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2021," *Journal Of Mister* 2, no. 1 (2025): 641–49.

Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi kebijakan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan distribusi<sup>15</sup>.

Dari sisi kebijakan, temuan literatur merekomendasikan penguatan sistem perlindungan sosial, reformasi perpajakan, dan peningkatan akses terhadap layanan publik sebagai strategi utama untuk menekan ketimpangan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi lokal, transparansi pengelolaan sumber daya, serta penguatan institusi publik menjadi langkah penting untuk menciptakan distribusi yang lebih merata. Beberapa studi juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi, sebagai upaya membangun sistem distribusi yang inklusif<sup>16</sup>.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan distribusi merupakan fenomena yang multidimensional dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan intervensi ekonomi semata<sup>17</sup>. Pendekatan teoritis dan empiris dari berbagai literatur menunjukkan bahwa keadilan dalam distribusi membutuhkan kombinasi antara kebijakan redistributif yang efektif, reformasi struktural, dan perubahan paradigma dalam memandang pertumbuhan serta pembangunan. Studi ini memberikan refleksi kritis bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merancang kebijakan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin keadilan sosial yang berkelanjutan<sup>18</sup>.

Temuan literatur juga menunjukkan bahwa faktor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas menyebabkan kelompok miskin sulit meningkatkan kapasitas ekonominya. Beberapa studi menunjukkan bahwa individu yang hanya menempuh pendidikan dasar memiliki peluang kerja dan pendapatan yang jauh lebih rendah dibanding mereka yang berpendidikan tinggi. Ketimpangan pendidikan ini memperparah ketimpangan ekonomi antar kelas sosial. Oleh karena itu, banyak literatur menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan inklusif sebagai fondasi untuk memperbaiki distribusi pendapatan secara jangka panjang<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> Selamat Rahmadi, Rida Setia, and Devi Siregar, "Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Sumatera," *Jurnal Paradigma Ekonomika* 19, no. 4 (2024): 941–52.

<sup>16</sup> Abdul Rahman, "Strategi Pengurangan Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Barat Melalui Peningkatan Pendidikan Dan Pengurangan Kemiskinan," *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 6, no. 1 (2025): 65–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.32585/jbfe.v6i1.6572>.

<sup>17</sup> Erlina Dwi Rahmawati, "Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia," *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Pembangunan* 2, no. 1 (2024): 1–8.

<sup>18</sup> Puput Iswandyah Raysharie, "Peran Dan Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2023," *Journal Of Economics And Regional Science* 5, no. 1 (2025): 67–78.

<sup>19</sup> Sherly Senja Rindiani, "Peran Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Dan Perlindungan Sosial Terhadap Ketimpangan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Trisakti* 5, no. 1 (2025): 33–44.

Selain pendidikan, ketimpangan akses terhadap teknologi dan digitalisasi juga menjadi faktor baru dalam memperdalam jurang distribusi. Di era ekonomi digital, literatur mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kelompok yang mampu mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi dengan kelompok yang tidak<sup>20</sup>. Di banyak negara berkembang, konektivitas internet dan literasi digital masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah pedesaan dan tertinggal. Akibatnya, kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap teknologi terpinggirkan dari peluang ekonomi digital seperti e-commerce, kerja lepas daring, dan inovasi berbasis platform. Hal ini menciptakan bentuk baru dari ketimpangan struktural yang berbasis pada teknologi<sup>21</sup>.

Literatur juga menyoroti bahwa ketimpangan gender berkontribusi pada distribusi pendapatan dan barang yang tidak merata. Perempuan sering menghadapi hambatan struktural dalam akses terhadap pekerjaan yang layak, kepemilikan aset, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Studi yang dianalisis menunjukkan bahwa meskipun perempuan terlibat dalam pasar kerja, mereka cenderung terjebak dalam sektor informal dengan upah rendah dan perlindungan kerja yang minim. Upaya untuk meningkatkan keadilan distribusi harus mempertimbangkan dimensi gender dengan memastikan kesetaraan peluang ekonomi antara laki-laki dan perempuan<sup>22</sup>.

Studi literatur juga mencerminkan bahwa ketimpangan sering kali diperkuat oleh kebijakan fiskal dan moneter yang tidak inklusif. Beberapa negara menerapkan insentif pajak yang justru menguntungkan korporasi besar atau individu kaya, sementara kelompok miskin tetap terbebani oleh pajak konsumsi atau tidak mendapatkan jaminan sosial yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap desain kebijakan ekonomi makro yang secara tidak langsung memperkuat ketimpangan. Literatur merekomendasikan transparansi anggaran, reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran, dan sistem pajak yang progresif sebagai alat untuk mengarahkan distribusi pendapatan ke arah yang lebih adil<sup>23</sup>.

Akhirnya, hasil studi ini juga menemukan bahwa ketimpangan yang tinggi berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan politik. Literatur dari lembaga seperti IMF dan UNDP memperingatkan bahwa ketika ketimpangan tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, memicu protes sosial,

---

<sup>20</sup> Eva Safrinja et al., "Analisis Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 3, no. 1 (2025): 119–32.

<sup>21</sup> Siti Raehanun Shalehah, "Dinamika Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia: Analisis Infrastruktur, Kinerja Ekonomi, Dan Pelayanan Sosial Di Tingkat Provinsi (2013-2022)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah* 7, no. 1 (2022): 60–68.

<sup>22</sup> Rebekka Krisdayani Sianturi, Nawarti Bustamam, and Universitas Islam Riau, "Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Riau," *Jurnal Ekonomi Kiat* 35, no. 1 (2024): 1–8.

<sup>23</sup> Muhammad Taufiq et al., "Tinjauan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Klasik Dan Islam Pada Ekonomi Modern," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 4, no. 2 (2025): 143–57.

dan menghambat kohesi sosial. Oleh karena itu, distribusi yang adil bukan hanya menjadi tujuan ekonomi, tetapi juga syarat penting untuk pembangunan berkelanjutan dan stabilitas jangka panjang. Kesadaran akan pentingnya keadilan distribusi harus menjadi bagian integral dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional dan internasional

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dan barang merupakan fenomena yang kompleks, multidimensional, dan bersifat sistemik. Melalui studi literatur terhadap berbagai teori dan temuan empiris, ditemukan bahwa ketimpangan tidak hanya terjadi karena dinamika pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural, kelembagaan, dan relasi global yang timpang. Distribusi yang tidak merata berdampak pada terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, dan partisipasi dalam pembangunan, yang pada akhirnya memperkuat siklus kemiskinan dan marginalisasi.

Dua pendekatan teoretis utama yang dianalisis—yaitu teori keadilan distributif John Rawls dan teori ketimpangan struktural dari aliran Neo-Marxian—memberikan kerangka konseptual yang saling melengkapi. Teori Rawls menekankan pentingnya prinsip keadilan sosial melalui kebijakan redistributif, sementara teori ketimpangan struktural menyoroti pengaruh dominasi ekonomi global dan relasi pusat-periferi yang tidak setara. Kedua teori ini memberikan dasar argumentatif yang kuat bagi perlunya reformasi sistemik dalam menciptakan distribusi yang adil.

Selain itu, studi literatur mengungkap bahwa ketimpangan diperkuat oleh berbagai faktor seperti akses pendidikan, kesenjangan digital, ketimpangan gender, serta kebijakan fiskal yang tidak inklusif. Ketimpangan ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata, tetapi juga berisiko menimbulkan instabilitas sosial dan melemahkan legitimasi institusi negara. Oleh karena itu, penanganan ketimpangan memerlukan pendekatan yang holistik dan lintas sektor, tidak hanya terbatas pada ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan teknologi.

Dengan demikian, distribusi yang adil bukan hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga prasyarat untuk pembangunan yang berkelanjutan, stabil, dan inklusif. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran negara, masyarakat sipil, dan komunitas internasional dalam membangun sistem distribusi yang berpihak pada kelompok rentan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agus Triono, HS. Tisnanta. “Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah.” *Jurnal Keindonesiaan* 02, no. 01 (2022): 12–36.

- Akhmad, Haidar, and Al Barabasi. "Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Periode 2017- 2023 ( Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia )." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 1 (2025): 221–34.
- Amalia, Adinda Maulida. "Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia." *Jambura Economic Education Journal* 6, no. 2 (2024): 616–28.
- Anjelita, Dhea, Br Ginting, Alexandra Hukom, Dedi Takari, and Pratiwi Subianto. "Analisis Distribusi Pendapatan Di Indonesia Dengan Pendekatan Path Analysis" 4, no. 1 (2024): 1–6.
- Chang, Nicholas. "Determinan Makroekonomi Dan Pajak Daerah Terhadap Ketimpangan Ekonomi." *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia* 6, no. 2 (2025): 233–60.
- Faranisa, Ariadna Aqila, Angelita Titis Pertiwi, Istiarsi Saptuti, Sri Kawuryan, and Sotya Fevriera. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi DIY Tahun 2012-2023 Dengan Pendekatan Model Mixed Effect" 21, no. 1 (2025): 1–11.
- Febriyan, Moh Alif, Maulidiah Indira Hasmarini, Ekonomi Pembangunan, and Universitas Muhammadiyah Surakarta. "The Effect Of Economic Growth , Education And Unemployment On Distribution Inequality In Central Java 2020-2024 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Di Jawa Tengah Tahun 2020-2024" 6, no. 3 (2025): 1959–68.
- Ibrahim, Azharsyah. "Buku Pengantar Ekonomi I." In *Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*, 269, 2021.
- Judijanto, Loso. "Ketidakmerataan Kekayaan: Kajian Literatur Tentang Implikasi Sosial Dan Ekonomi." *Journal of Community Dedication* 5, no. 1 (2025): 61–69.
- Kurniawan, Rendi, and Syamsul Huda. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali." *Jdep* 3, no. 2 (2020): 91–99.
- Marti'ah, Siti. "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa 2009-2021." *Juremi* 4, no. 6 (2025): 1275–82.
- Mashita, Juni. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2021." *Journal Of Mister* 2, no. 1 (2025): 641–49.
- Raharjo, Budi. "Buku Ekonomi Mikro." In *Yayasan Prima Agus Teknik*, 391, 2020.
- Rahmadi, Selamat, Rida Setia, and Devi Siregar. "Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Sumatera." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 19, no. 4 (2024): 941–52.
- Rahman, Abdul. "Strategi Pengurangan Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Barat Melalui Peningkatan Pendidikan Dan Pengurangan Kemiskinan." *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 6, no. 1 (2025): 65–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.32585/jbfe.v6i1.6572>.
- Rahmawati, Erlina Dwi. "Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia." *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Pembangunan* 2, no. 1 (2024): 1–8.
- Raysharie, Puput Iswandyah. "Peran Dan Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2023." *Journal Of Economics And*

- Regional Science* 5, no. 1 (2025): 67–78.
- Rindiani, Sherly Senja. “Peran Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Dan Perlindungan Sosial Terhadap Ketimpangan Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 5, no. 1 (2025): 33–44.
- Safrinja, Eva, Puti Andiny, Martahadi Mardhani, and Safuridar Safuridar. “Analisis Ketimpangan Pendapatan , Indeks Pembangunan Manusia , Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 3, no. 1 (2025): 119–32.
- Shalehah, Siti Raehanun. “Dinamika Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia: Analisis Infrastruktur, Kinerja Ekonomi, Dan Pelayanan Sosial Di Tingkat Provinsi (2013-2022).” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah* 7, no. 1 (2022): 60–68.
- Sianturi, Rebekka Krisdayani, Nawarti Bustamam, and Universitas Islam Riau. “Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Riau.” *Jurnal Ekonomi Kiat* 35, no. 1 (2024): 1–8.
- Taufiq, Muhammad, Maria Melidiana, Jaya Eka Sasmita, and Lu Bintani. “Tinjauan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Klasik Dan Islam Pada Ekonomi Modern.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 4, no. 2 (2025): 143–57.
- Wau, Taosige. “Buku Ekonomi Internasional Suatu Kajian Teori Dan Empiris.” In *Magister Ekonomi Syariah (MES) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021*, 231, 2021.